

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam karakteristik masyarakat yang menjadi salah satu permasalahan terpenting yang harus menjadi perhatian bersama semua komponen masyarakat maupun pemerintah. Salah satunya adalah masalah sanitasi yang membuat resah masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu yang ikut menyumbang permasalahan adalah industri yang ada di Kabupaten Gresik, pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik diikuti dengan semakin banyaknya warga baru dari para pekerja di industri tersebut, ditambah dengan penduduk yang sudah ada, berbagai macam peluang dan tantangan dihadapi oleh masyarakat. Masalah lingkungan menjadi tantangan yang sebenarnya. penduduk Kabupaten Gresik mendiami lebih dari 50 persen wilayah pesisir, pertumbuhan penduduk lumayan padat di beberapa kecamatan, misalnya di sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, dan Kecamatan Ujungpangkah. Tantangan lingkungan juga datang dari alam seperti curah hujan rendah, tanah kurang dapat menyimpan air, serta terdapat endapan di muara-muara sungai. Selanjutnya, banyak muara aliran drainase di wilayah perkotaan Karena itu, beberapa wilayah di Kabupaten Gresik sering kekurangan air bersih, sebagai akibatnya Sanitasi masyarakat menjadi tidak baik.

Tantangan yang terjadi itu memacu untuk menggulirkan *grand design* sanitasi yang mempunyai kurun waktu 5 tahun sekali yaitu lewat

program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Atas dasar itu pemerintah Kabupaten Gresik telah membentuk Kelompok Kerja Sanitasi guna menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PPSP. Kelompok Kerja (POKJA) ini diperkuat dengan adanya SK Bupati Gresik No. 050/390/HK/437.12/2010 yang telah dibukukan dalam berita acara kabupaten Gresik tertanggal 29 Nopember 2010 no 704. Dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah) sebagai *Leading Sector* dengan didukung oleh lembaga yang terkait lainnya diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, , Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan PDAM.

Pada September 2011 Pemerintah Kabupaten Gresik membentuk tim pelaksana kegiatan *Environment Health Risk Assessment* (EHRA). Study *Environment Health Risk Assessment* (EHRA) merupakan salah satu study yang sangat populer yang dilakukan untuk mngetahui tingkat resiko sanitasi pada satu wilayah. Study ini dilakukan dengan metode survey yang bersifat parsitipatif di tingkat Kabupaten, secara khusus study ini dilakukan untuk memahami kondisi fasilitas sanita dan higinitas serta perilaku-perilaku masyarakat pada skala rumah tangga. Fasilitas sanitasi yang diteliti mencakup sumber air minum, layanan pembuangan sampah, jamban, dan saluran pembuangan air limbah dan untuk perilaku yang dipelajari adalah yang terkait dengan higinitas dan sanitasi, antara lain cuci tangan pakai sabun (CTPS), buang air besar, pembuangan kotoran anak, dan pemilahan sampah. Dan selanjutnya Bappeda Kabupaten Gresik mengerahkan 148 anggota tim survei –tersebar di puskesmas– dengan didukung anggaran sebesar Rp 300 juta.

Berikut merupakan tabel hasil pengkajian *Environment Health Risk Assessment* (EHRA) untuk tiap sektor sanitasi di wilayah Kabupaten Gresik :

Tabel 1.1 Hasil Pengkajian EHRA tentang permasalahan sanitasi sub sektor persampahan

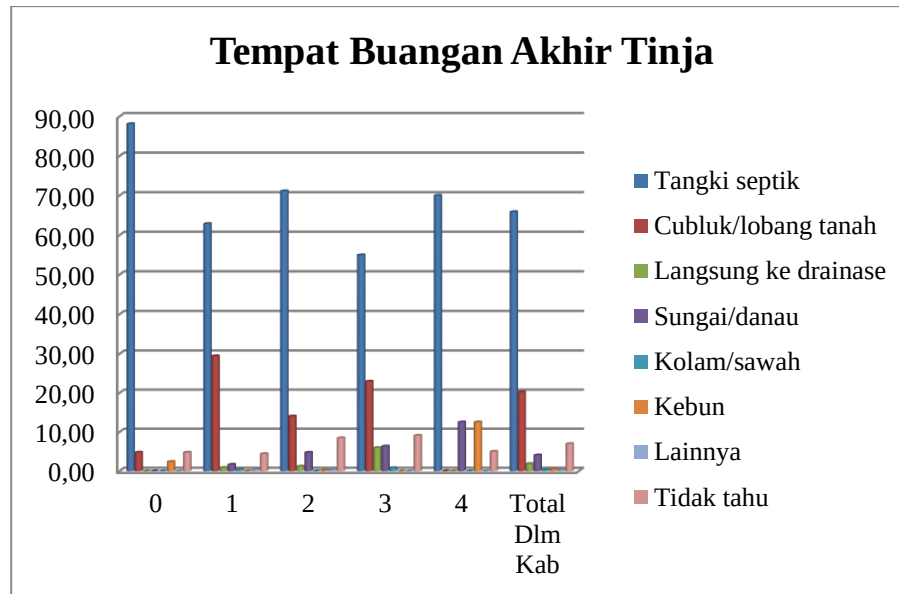
No.	Kegiatan warga	Presentase (%)
1.	Membakar sampah sendiri	49 %
2.	Membuang /mengubur sampah	20 %
3.	Membuang sampah dilahan kosong	18 %
4.	Membuang sampah kedalam sungai	9 %
5.	Mengakut sampah ke TPS	2 %
6.	Lainnya	2 %

Sumber: Memorandum Program Strategi Sanitasi (MPSS) Kab. Gresik

Hasil pengkajian EHRA diatas menyebutkan 49 persen warga di Kabupaten Gresik membakar sendiri sampahnya, sedangkan yang membuang/mengubur sampah ada sebesar 20 persen. Sementara itu ada 18 persen warga yang membuang sampah di lahan kosong dan 9 persen lainnya membuang sampah kedalam sungai. Sebaliknya hanya ada sekitar 2 persen warga yang mengangkut sampahnya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Ditambah lagi dengan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah domestik sudah berkisar 66 peresn. Penyebab utama penecemaran itu adalah tangki septik yang digunakan oleh warga serta penyebab lain yaitu drainase rumah tangga dan program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Selanjutnya permasalahan dibidang Air Limbah , berikut adalah grafik gambaran permasalahan sanitasi di bidang Air Limbah.

Grafik 1.2 Hasil Pengkajian EHRA tentang permasalahan sanitasi sub sektor Air Limbah

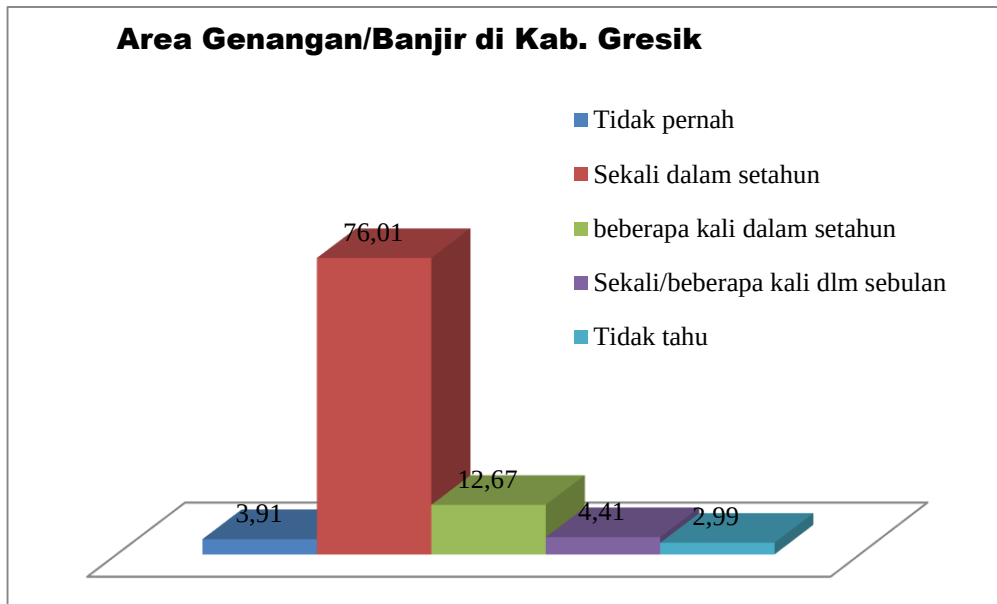


Sumber: Memorandum Program Strategi Sanitasi (MPSS) Kab. Gresik

Berdasarkan Survey EHRA di atas dapat dilihat Kepemilikan jamban pribadi 86,7%, WC umum/MCK 2,13%, sisanya tidak memiliki WC. Dari Studi Ehra tempat pembuangan tinja di Kab Gresik : Ke septic tank 65,86%, cubluk 20,2%, langsung saluran drainase 1,85, sungai 4,05%, sisanya kebun, kolam, dll. Dari kepemilikan tanki septic di atas, tanki septic dengan suspect aman hanya 32,61%, tidak aman dengan pengurasan >5 th 62,53%. Sisanya tidak tahu. Pemda belum memiliki mobil tinja. Mobil tinja hanya dimiliki pihak swasta. Layanan limbah cair melalui sistem sewerage hanya ada di satu wilayah kecil (25 KK) Saluran limbah cair Domestik masih jadi satu dengan saluran Drainase.

Selanjutnya adalah masalah sub sektor Drainase, Dari study Ehra diperoleh data bahwa hanya 10,03% Penduduk yang memiliki sumur resapan, 32,43% memanfaatkan parit, tidak memiliki sarana 52,28%, dan sisanya menggunakan sarana lain yang tidak diketahui.

Grafik 1.2 Hasil Pengkajian EHRA tentang permasalahan sanitasi sub sektor Air Limbah



Sumber: Memorandum Program Strategi Sanitasi (MPSS) Kab. Gresik

Dari study EHRA diatas dapat diketahui bahwa, Persentase genangan air di lingkungan permukiman menurut hasil survei EHRA di Kabupaten Gresik tahun 2011 : sebesar 76,01% setidaknya mengalami banjir sekali dalam setahun, 12,67% beberapa kali/tahun. Sisanya tidak pernah/tidak tahu. Dari 356 desa seluruh kabupaten, sebanyak 24 desa sering mengalami banjir.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabuapten Gresik memperbaharui komposisi POKJA sanitasi melalui SK bupati. Langkah-langkah pecepatan pembangunan pun akan segera ditetapkan, ada 4 sasaran yang ditetapkan yaitu menangani Air Limbah, mengatasi Persampahan, meperbaiki Drainase, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Pada tahun 2013, pemerintah Kabupaten Gresik memfokuskan akselerasi sanitasi permukiman pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar. Kecamatan Kebomas maupun Kecamatan

Manyar mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sedangkan Kecamatan Gresik dipilih karena berada di tengah Kabupaten Gresik. Tiga kecamatan tersebut juga menjadi penerima sisi positif sekaligus sisi negatif dari industri yang ada di Kabupaten Gresik.

Pembangunan sanitasi di Indonesia telah ditetapkan dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 oleh pemerintah Indonesia. Implementasi dan langkah-langkah untuk pelaksanaan program tersebut juga telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 yang mana pelaksanaannya akan difokuskan pada program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman atau yang disebut PPSP merupakan tindak kerja kolaborasi berbagai sektor atau bidang yang terkait dengan masalah sanitasi . Pada tingkat Nasional , koordinasi kebijakan dilakukan oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) yang merupakan unsur dari lintas Departemen dan terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan , Departemen Kesehatan , Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebagai wujud komitmen yang tinggi dan keseriusan untuk membangun sektor sanitasi lokal dan penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik di daerah perkotaan . dalam hal ini pemerintah telah menyiapkan bantuan teknis kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk membantu jalannya program kegiatan tersebut agar bisa berlangsung dan berjalan dengan baik.

Dari pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang telah berjalan di Kabupaten Gresik masih banyak ditemukan kendala sehingga pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sehingga Program tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan evaluasi atau koreksi tentang bagaimana pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tersebut baik mengenai waktu pelaksanaan, berapa dana yang digunakan, serta bagaimana program tersebut berjalan dan lain-lain yang berkaitan dengan program PPSP tersebut. Agar nantinya program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program PPSP tersebut sehingga peneliti memberikan judul penelitiannya yaitu “Analisis evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik menurut Pemerintah Daerah dan Masyarakat?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik?

3. Bagaimana solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dan perbaikan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik kedepan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik menurut Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik.
3. Untuk mengetahui Bagaimana solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dan perbaikan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik kedepan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian, maka dapat diperoleh Manfaat Penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masukan yang bermanfaat terkait dengan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik agar lebih baik kedepan .
2. Bagi penulis, dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan baru tentang evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik.

3. Bagi pihak lain, penelitian ini memberikan gambaran mengenai realisasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Gresik serta penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya oleh pihak lain .